

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Uni Eropa menjadi aktor utama dalam menentukan arah kebijakannya, termasuk dalam isu lingkungan global seperti deforestasi. Meskipun pada awalnya UE memandang deforestasi sebagai masalah yang harus segera diselesaikan, proses politik internal menunjukkan arah berbeda, ditandai dengan penundaan implementasi EU Regulation on Deforestation-free Products (EUDR). Penundaan ini terjadi melalui proses kebijakan yang dipengaruhi oleh berbagai aktor, dalam penelitian ini institusi perumus kebijakan, European People's Party, dan Jerman yang memiliki pengaruh signifikan dalam perumusan kebijakan UE.

Penelitian yang telah dilakukan menggunakan *Multiple Streams Approach* (MSA) sebagai pisau analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai penyebab penundaan implementasi EUDR. Penundaan tersebut terjadi karena terbukanya *policy window* dengan adanya pemilu Parlemen Eropa 2024. Elemen politik menjadi titik berubahnya arah kebijakan UE terhadap EUDR. Perubahan arah kebijakan ini dikarenakan adanya *problem framing* berupa ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat UE terhadap sasaran yang tidak tepat, sehingga mengganggu rantai pasokan dan membebani petani kecil. *Problem framing* ini kemudian dikonsolidasi melalui pemilu Parlemen. Pemilu ini kemudian mempengaruhi prioritas Komisi Eropa dan strukturnya.

EPP, bagian dari Parlemen Eropa, memainkan perannya sebagai *policy entrepreneur* dalam mendorong penundaan implementasi EUDR. EPP menggunakan kekuasaannya untuk mengarahkan kebijakan dengan manipulasi

*problem* yang dikonsolidasikan setelah pergantian anggota Parlemen Eropa. Dalam situasi meningkatnya gelombang protes terhadap kebijakan lingkungan, EPP mengambil posisi berpihak pada kelompok terdampak, yakni petani dan pelaku usaha kecil dengan menyuarakan keberatan mereka terhadap beban administratif.

Dalam proses perumusan regulasi yang telah dijelaskan, kompleksitas internal dalam struktur institusi UE dan dinamika politik negara anggota turut membentuk ruang kompromi bagi para pembuat kebijakan. Kondisi tersebut ditambah dengan adanya batasan waktu yang semakin dekat, menyebabkan penundaan ini tidak sepenuhnya rasional sebagaimana biasanya terjadi dalam perumusan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, penundaan implementasi tanpa mengubah substansi regulasi dianggap sebagai langkah paling realistis yang dapat diambil.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masuknya penundaan implementasi EUDR ke dalam agenda politik UE dipengaruhi oleh perubahan konfigurasi politik internal pasca pemilu. Kemudian agenda tersebut dimasukkan melalui *problem framing* yang telah terjadi jauh sebelum pemilu itu sendiri. Lebih lanjut, peneliti menilai bahwa penundaan ini merupakan kebijakan yang dapat diprediksi karena partai pemenang di dalam pemilu telah memosisikan diri mereka pada permasalahan rakyat UE sebelum pemilu diadakan.

## 5.2 Saran

Hingga saat ini, Uni Eropa masih dianggap sebagai kawasan progresif dalam mempromosikan upaya-upaya menjaga lingkungan dan memerangi perubahan iklim. Oleh karenanya, penundaan regulasi yang ditujukan untuk memerangi perubahan iklim menjadi pembahasan yang hangat untuk para ahli saat

ini. Peneliti menyadari bahwa penggunaan kerangka konseptual MSA ini memiliki cakupan fokus yang lebih sempit dalam menganalisis penyebab penundaan penundaan implementasi EUDR, yakni pada level UE.

Maka dari itu, peneliti merekomendasikan agar penelitian selanjutnya mengkaji isu penundaan implementasi EUDR dari sudut pandang alternatif guna memperluas dan memperdalam pemahaman terhadap fenomena ini. Salah satu topik yang disarankan adalah mengkaji pengaruh tekanan internasional terhadap pengambilan keputusan di tingkat Uni Eropa, yakni pada tekanan negara mitra dagang, lembaga internasional, atau koalisi negara berkembang dalam mempengaruhi proses legislasi di UE. Selanjutnya, direkomendasikan untuk menelusuri ketidakberhasilan Uni Eropa mendorong negara-negara emiter, seperti Tiongkok untuk mengadopsi regulasi serupa dalam upaya mengurangi deforestasi global.

Pada akhirnya, saran penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, khususnya dalam kajian kebijakan luar negeri. Lebih lanjut, penelitian lanjutan yang diharapkan juga dapat memberikan sumbangsuhnya terhadap kajian kebijakan luar aktor non-negara seperti UE yang masih menjadi perdebatan bagi sebagian pihak dalam Hubungan Internasional. Dengan demikian hasil-hasil penelitian mendatang dapat memperkaya wawasan ilmiah Hubungan Internasional dan menyediakan landasan yang lebih komprehensif bagi evaluasi kebijakan lingkungan UE di masa depan.